

Parah, Carut-Marut

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

"Sebagai jembatan dari pemerintah daerah, belum maksimal kerja bagian ekonomi ini," kata Dedi Rustandi, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Karawang menandakan.

Diungkapkan Dedi, beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang menuturkan jika saat ini seleksi pemilihan jajaran direksi PT LKM Karawang sedang dilakukan. Namun nyatanya belum.

Karena, kata dia, sebelum panitia seleksi (pansel) dibuat harus ada audit internal dan audit independen terlebih dahulu yang harus diselesaikan. Dan pansel ini juga harus diumumkan ke publik prosesnya, lanjut Dedi menjelaskan.

Komisi II mendesak di tahun 2020 ini PT LKM Karawang harus sudah menyelesaikan audit."Semua audit ini bisa diselesaikan agar pansel dapat segera dibuat, Jika masih belum selesai juga akan kita pertanyakan kembali, kita akan dorong kembali," tegasnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerangkan, dari hasil audit nanti akan terlihat bagaimana kondisi PT LKM Karawang seutuhnya.

"Hasil dari audit ini nanti akan kita analisa apakah LKM ini memang harus tetap dipertahankan untuk bisa hidup dan menjadi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Karawang yang kembali dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat atau kita evaluasi untuk tidak dilan-

jutkan atau dibubarkan, kalau merugi terus," jelas Dedi gamblang.

"Tentu saja selama hasil audit dan pengkajian serta pertimbangan ini bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sementara itu, Penyertaan modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang di Anggaran perubahan kemarin, kata Dedi, itu adalah penyertaan modal terakhir yang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah untuk diberikan, serta tertuang jelas dalam peraturan daerah.

"Pemegang saham PT LKM Karawang adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,57% dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebesar 61,43%. Dan ada aturan yang mengatur berapa penyertaan modal yang memang harus diberikan, baik dari propinsi maupun daerah," pungkasnya.

Jabar Tak Kucur Modal

Di saat Pemkab Karawang memaksakan mengucur modal, Pemdaprov Jawa Barat sebagai pemilik saham kedua terbesar setelah Pemkab Karawang memilih ogah mengucur duit untuk PT LKM lantaran tidak memiliki manfaat balik yang positif bagi Pemdaprov Jawa Barat..

Kini, kondisi perusahaan plat merah yang bergerak dalam bidang permodalan dan simpan-pinjam itu sedang centang-perenang. Merugi karena kredit macet hingga miliaran, tak punya direksi definitif, juga belum kunjung menggelar

rapat umum pemegang saham (RUPS) setahun sekali.

Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan kepada Jabar Ekspres (KBE Group) menuturkan, produktifitas setiap BUMD bisa menghasilkan kontribusi bagi kas daerah merupakan tugas direksi.

"Tugasnya direksi itu memastikan aset tidak produktif menjadi produktif," kata Hasim.

Pada rapat Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) akhir 2019 lalu kalangan DPRD Jabar tidak menyetujui pembiayaan APBD terhadap BUMD. Kecuali bank bjb dengan suntikan dana Rp 100 Milliar.

"Tahun ini tidak ada penyertaan modfal untuk LKM," ujar Anggota DPRD Jabar Dapil Karawang-Purwakarta, Ihsanudin saat dikonfirmasi oleh KBE, kemarin (26/10).

Alasannya, lebih banyak suntikan dana dari pemerintah daripada keuntungan yang di dapat. Ibarat kata-besar pasak daripada tiang. Alhasil, kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Sugianto Nang-golah, menilai permasalahan BUMD sangat klasik. Ditambah adanya pandemi covid-19.

"Tadi kita mempermasla-

hakan BUMD. Kita sekarang ini cenderung merugi. Padahal kita tidak ingin BUMD ini selalu merugi," ucap Sugianto di Bandung, Rabu (21/10).

Disinggung mengenai kinerja BUMD, politis Demokrat itu menilai seluruh BUMD Jabar tidak menunjukkan tren yang bagus. Kecuali bank bjb dan Migas Hulu Jabar yang terlihat bagus kinerjanya.

"Diluar itu tidak ada yang menghasilkan. Bahkan sekarang ini ada BUMD yang terlitit dengan hutang," kata dia.

Sejumlah pengamat di Karawang menilai, jika memang PT LKM tidak terkendala Non Performing Load (NPL), tidak mungkin nilai piutangnya mencapai Rp.5,2 Miliar. sampai berada di ambang kepailitan. Hli Hukum UVP Karawang, Muhammad Gary Gagarin, menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai owner harus segera melakukan audit independen terhadap PT. LKM Karawang.

Menurut Gary, pengkajian dilakukan untuk mengetahui kenapa perusahaan milik daerah ini bisa mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. "Berarti ada yang salah dalam proses pengelolaannya, hal ini bisa dilihat dari analisis resiko yang rendah, tidak ada pemeriksaan dan pengawasan, dan lain sebagainya. Sehingga harus dilakukan audit independen agar bisa mengetahui dengan jelas kerugiannya karena apa, dan bagaimana peluang bisnis PT LKM ini ke depannya," tutur Gary kepada awak media. (*)